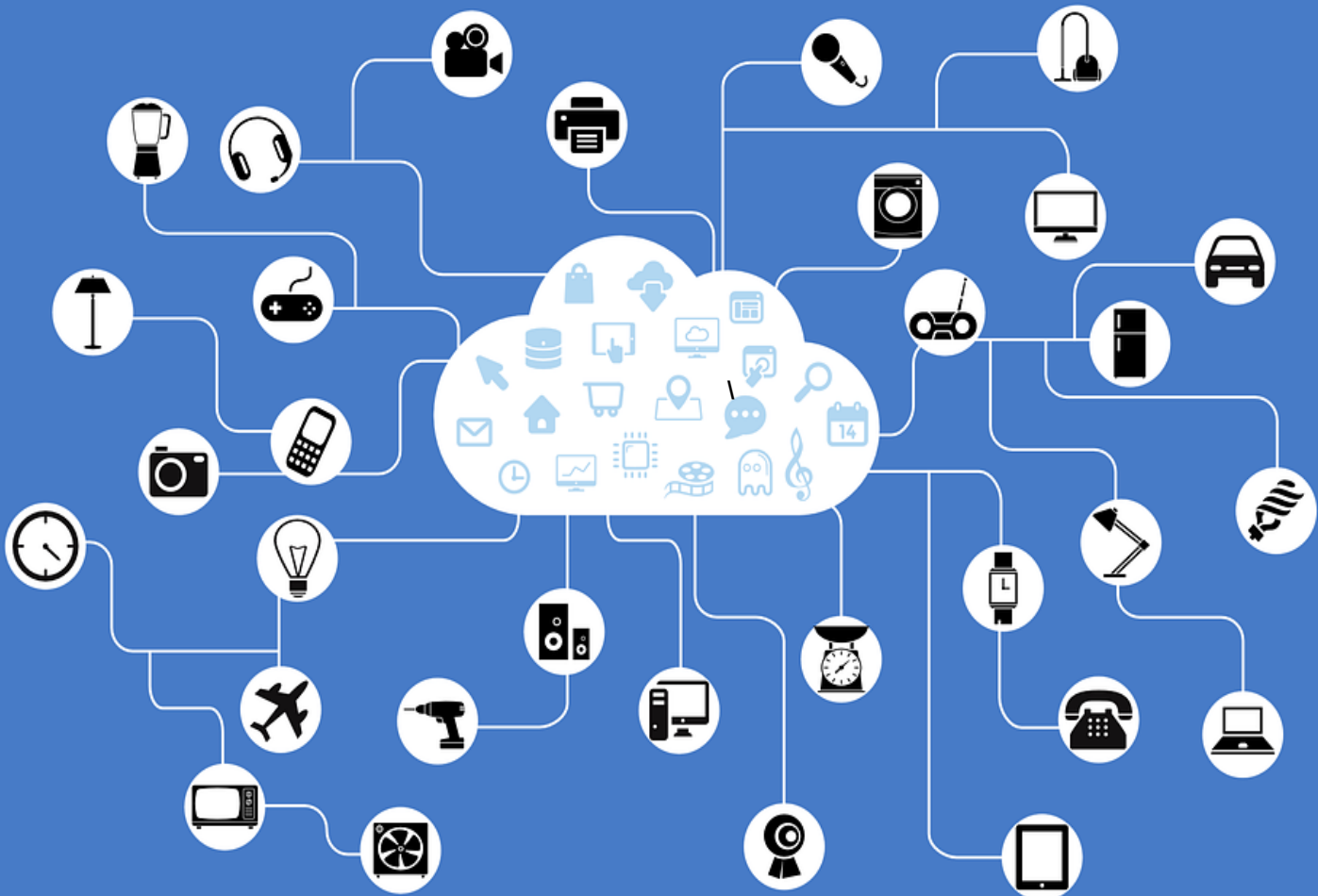




**PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode tahun 2020, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan secara teknokratis maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan tersusunnya dokumen Renja Tahun 2020 ini dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang lebih berhasil guna, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja Tahun 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan dokumen Renja untuk masa mendatang. Amin

Luwuk, 15 Juli 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai



Drs. DJAYADIN, MM

NIP. 19611113 198903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ...	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ..	22
3.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V PENUTUP	27
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Lampiran 2 : Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam tiap-tiap Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas maka telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai dan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJMD tersebut. Untuk itu setiap perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renja guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Renja memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Banggai yang tergolong masih sangat muda karena baru terbentuk pada Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pun diharuskan menyusun dokumen Rencana Kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas dan fungsi perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan opini

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Banggai, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Banggai, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Kabupaten Banggai, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten Banggai dan masyarakat lingkup Kabupaten Banggai.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui tahap-tahap perumusan dan penyajian dokumen dengan mengacu pada hasil analisis gambaran pelayanan, hasil evaluasi capaian Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai serta telaahan terhadap usulan program dan khususnya kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat perumusan program dan kegiatan prioritas untuk menjawab dan memecahkan permasalahan pembangunan / isu strategik bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini memberikan gambaran program dan kegiatan prioritas serta uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator kinerja baik keluaran (*output*) kegiatan maupun hasil (*outcome*) program, satuan, volume, target dan pagu indikatif pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja Tahun 2020 ini juga dimaksudkan sebagai pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020.
2. Untuk memudahkan dalam menetapkan beban atau target pada setiap sub unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020.
5. Untuk memudahkan pengukuran dan penilaian kinerja yang diharapkan dapat dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, yang memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan awal tahun 2019, Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika,

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memaparkan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan pada tahun 2020;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memaparkan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020;

Bab V Penutup, yang berisikan tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, komitmen dan harapan dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan Review Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2019 dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang sudah disahkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan Matriks Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai sampai dengan tahun 2019, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya. Hal ini tercermin dengan dicapainya 3 (tiga) sasaran sesuai dengan Renja Tahun 2018. Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil dan keluaran sebesar Rp.4.111.984.976,- atau 94,43% dari total pagu anggaran program/ kegiatan yang ditetapkan sebesar Rp.4.354.584.414. Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Rencana Dinas Kominfo s/d dengan tahun 2019
Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.10	Komunikasi dan Informatika									
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01.01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	5.920 Lembar	1.500	1.000	1.000	100	1.120	3.600	60,81
01.02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan air, listrik, dan internet	11 Jaringan	4	5	5	100	6	6	54,55
01.06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat/dua yang diurus izin STNK-nya	27 Unit	-	-	-	0	10	10	37,04
01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan	3 Org	3	3	3	100	3	3	100
		Jumlah peralatan kebersihan/ bahan pembersih	15 Jenis	15	15	15	100	15	15	100
01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	22 Jenis	22	22	22	100	22	22	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	186 Blok	15	30	30	100	50	95	51,08
		Jumlah fotocopy berkas	194.000 Lembar	40.000	40.000	40.000	100	38.000	32.500	60,82
		Jumlah jilid berkas/ dokumen	106 Buku	25	100	100	100	20	145	136,79
01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik	26 Jenis	5	5	5	100	5	15	61,54
01.15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	13.920 Eksemplar	1.920	2.160	2.160	100	3.360	7.440	53,45
01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/ minuman yang dibutuhkan	5.795 Dos	1.160	1.000	1.000	100	1.672	3.832	66,13
01.18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	127 kali	37	17	17	100	28	82	64,57
01.19	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah	1.077 Kali	140	120	120	100	214	474	44,01
01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	34 Org	36	33	33	100	30	34	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
02.05	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat dan roda dua	29 Unit	7	10	-	0	11	18	62,07
02.07	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	26 Jenis	8	5	5	100	3	7	100
02.09	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	27 Jenis	4	4	4	100	9	4	44,44
02.10	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diadakan	18 Jenis	4	-	-	0	4	4	100
02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	27 Unit	-	3	3	100	10	10	100
02.26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	13 Unit	3	10	10	100	13	13	100
02.28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	30 Unit	10	10	10	100	26	26	100
02.42	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruangan / komponen gedung kantor yang direhabilitasi	11 Unit	3	3	3	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur									
03.02	Kegiatan Penyediaan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atributnya yang diadakan	151 Pasang	39	-	-	0	49	-	0
03.03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	83 Pasang	78	80	80	100	83	-	0
03.04	Kegiatan Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	63 Pasang	-	-	-	0	48	48	100
03.05	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	356 Pasang	78	80	80	100	83	-	0
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	18 Org	2	4	1	25	4	4	100
05.04	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-						
06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan Laporan TEPRAs yang tersusun	8 Dokumen	-	1	1	100	2	2	100
06.03	Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan & laporan prognosis yang tersusun	52 Dokumen	13	13	13	100	13	13	100
06.04	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang tersusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
06.05	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	28 Dokumen	5	5	5	100	5	5	100
06.07	Kegiatan Penyusunan Dokumen RKBUs Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBMD Dinas Kominfo yang tersusun	25 Laporan	1	1	1	100	-	-	-
06.08	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan money yang tersusun	25 Laporan	1	1	1	100	-	-	-
06.09	Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset yang tersusun	25 Laporan	1	1	1	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Pengembangan Sistem Informasi Data	Meningkatnya validitas Informasi Data profil dinas								
07.04	Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil Dinas yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	0	1	1	100
08	Program Perencanaan Umum	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik								
08.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	100
15	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi								
15.01	Kegiatan Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah lembaga penyiaran yang dilakukan pengawasan	93 Buah	-	-	-	0	93	93	100
15.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah infrastruktur dasar dan sarana TIK yang terbangun/ terpasang	21 Jenis	10	2	2	100	3	3	100
15.05	Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio/ komunikasi yang diadakan	11 Jenis	-	2	2	100	3	3	100
15.06	Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah laporan monitoring pengawasan informasi publik	3 Dokumen	-	-	-	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.07	Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah produk hukum/ kebijakan bidang komunikasi dan informasi	2 Dokumen	-	-	-	0	-	-	0
15.08	Kegiatan Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah kegiatan Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	0	-	-	0
15.10	Kegiatan Pembangunan Media Center	Jumlah media center yang dibangun guna mendukung pelayanan informasi publik	1 Unit	-	-	-	0	-	-	0
15.11	Kegiatan Operasional Pelayanan Media Center	Jumlah kebutuhan operasional layanan media center	6 jenis	-	-	-	0	-	-	0
15.12	Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Website daerah	Jumlah situs web daerah yang dikelola	1 Situs Web	1	1	1	100	1	1	100
15.13	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	1 Aplikasi	-	1	1	100	1	1	100
17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang TIK								
17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang TIK	20 Orang	-	-	-	0	10	3	30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Program kerjasama informasi dengan media massa	Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik								
18.01	Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 Media	-						
18.02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Media	2						
18.03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah media penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat	3 Media	-						
18.04	Dukungan Pemanfaatan Informasi Warung Masyarakat (WIM)	Jumlah Warung Informasi masyarakat (WIM) yang difasilitasi	3 WIM	-						
18.05	Melaksanakan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi	23 Kelompok	1						
18.07	Mengadakan Sosialisasi Terpadu tingkat Kabupaten	Jumlah sosialisasi pemanfaatan TIK secara terpadu	3 Kegiatan							
18.10	Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media Informasi	Jumlah media pelayanan informasi kepada masyarakat	2 Media							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral									
	Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral									
	Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral									
	Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2019)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Karenanya, sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran perangkat daerah.

Dari hasil pengukuran kinerja pelayanan pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat mencapai tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan dan program. Namun, dari kualitas kinerja pelayanan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal, karena ditemukan masih adanya masalah yang muncul seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dalam hal ini jumlah pegawai belum memenuhi formasi yang dibutuhkan sesuai hasil Analisis Beban Kerja (ABK). Dengan memperhatikan ketersediaan SDM, kinerja pelayanan birokrasi dan kondisi kepegawaian berdasar kuantitas dan kualitas pendidikan yang ada saat ini masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Terlebih lagi dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency*. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	-	-	-	-	-	36	38	40	34	34		35	37	
2.	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel														

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang masih akan dihadapi dalam periode pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2020. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020, ada beberapa isu penting yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pencapaian sasaran kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih akan menjadi isu penting yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 nanti. Untuk lebih jelasnya, permasalahan mendasar tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blank spot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Balantak Utara, pesisir utara Kecamatan Bunta dan beberapa desa di Kecamatan Simpang Raya, Batu Selatan dan Bualemo.

2. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government. Selain itu, terbatasnya SDM tenaga teknis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan data dan informasi berbasis elektronik pada perangkat daerah. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pemuktahiran data perangkat daerah dan belum tersosialisasikannya e-government pada perangkat daerah.

3. Layanan Pengurusan Rekomendasi / Izin dan Administrasi Teknis

Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi teknis seperti lembaga penyiaran lokal, Pembangunan Menara Telekomunikasi, Papan Reklame, dan Penggelaran Kabel Serat Optik (FO) banyak disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya masih banyak pihak yang belum mengetahui bahwa proses perizinan harus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga kadangkala mengabaikan persyaratan adanya rekomendasi kelengkapan administrasi secara teknis.

4. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Belum termanfaatkannya KIM sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat.

5. Maraknya Hoax, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware

Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.

6. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

6. Diseminasi Data Statistik Sektoral

Masih belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral dipengaruhi SDM aparatur bidang statistik yang terbatas dan belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral pada perangkat-perangkat daerah yang terkait.

7. Sarana dan Prasarana Aparatur

Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server yang memadai, media center, ruang workshop, ruang kerja pegawai.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Selanjutnya proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Bupati Banggai. Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Renja Tahun 2020 perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 kami sajikan dalam bentuk matrik tabel yang dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020. Kebanyakan usulan kegiatan masyarakat sangat berkaitan dengan isu strategis yaitu masih terbatasnya infrastruktur dasar dan sarana penunjang informasi dan komunikasi masyarakat. Terkait hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menelaah usulan-usulan kegiatan dari masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

1. Beberapa usulan seperti Pembangunan Menara Telekomunikasi (Tower BTS) bukan merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika melainkan kewenangan penyelenggara telekomunikasi BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) yang merupakan unit organisasi non eselon di Kementerian Kominfo yang mempunyai tugas melaksanakan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika, penyedia menara seperti BUMN PT.Telkom dan provider swasta dan kontraktor menara. Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengintervensi usulan-usulan tersebut melalui pengadaan dan pemasangan Repeater (Penguat Signal seluler). Tindaklanjutnya dengan melakukan kajian teknis melalui survei dan identifikasi untuk menentukan titik koordinat lokasi kegiatan.
2. Masih banyak informasi atas usulan kegiatan yang belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan konfirmasi atas usulan-usulan yang belum lengkap tersebut. Ada beberapa usulan yang diberi catatan untuk dikonfirmasi kembali sesuai dengan hasil kajian teknis dan analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk lebih jelasnya mengenai kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2020, disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengadaan dan Pemasangan Repeater Seluler (Penguat Sinyal)	Desa Nanga-Nangaon, Kecamatan Bunta	Jumlah menara penguat sinyal (repeater) seluler yang diadakan / dibangun	1 Paket	Diperlukan kajian teknokratis / Survei untuk menentukan titik koordinat lokasi kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan
		Desa Bulu, Kecamatan Pagimana		1 Paket	
		Desa Toweer, Kecamatan Balantak Utara		1 Paket	
		Desa Tampe, Kecamatan Pagimana		1 Paket	
		Desa Taima, Kecamatan Bualemo		1 Paket	
		Desa Binsil, Kecamatan Bualemo		1 Paket	
		Desa Bimakarya, Kecamatan Bualemo		1 Paket	
		Desa Samalore, Kecamatan Toili		1 Paket	
		Desa Benteng, Kecamatan Toili		1 Paket	
		Desa Piondo, Kecamatan Toili		1 Paket	
		Desa Ue Mea, Kecamatan Toili		1 Paket	
		Desa Boitan, Kecamatan Luwuk Timur		1 Paket	
		Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan		1 Paket	
		Desa Masunggang, Kecamatan Batui Selatan		1 Paket	
		Desa Sukamaju, Kecamatan Batui Selatan		1 Paket	
		Desa Sukamaju I, Kecamatan Batui Selatan		1 Paket	
Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan	1 Paket				
Desa Lokait, Kecamatan Simpang Raya	1 Paket				
Desa ???, Kecamatan Balantak Utara	1 Paket				
2	Pengadaan dan Pemasangan Repeater VHF	Kecamatan Luwuk Selatan	Jumlah menara penguat sinyal (repeater) radio yang diadakan / dibangun	1 Paket	
3	Pembentukan KIM	Kecamatan Masama	Jumlah KIM terbentuk yang difasilitasi	1 Kelompok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector*. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain : 1) Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal; 2) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman; 3) Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika; 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi; 5) Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing; 6) Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan 7) Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu: a) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran; c) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran; d) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 adalah: 1) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam

menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan. 2) Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3) Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman. 4) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemkominfo akan mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumber daya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan.

Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi. Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan

prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019. Kebijakan nasional terkait pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang tertuang dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal) dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Mewujudkan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimana yang dimaksud dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai memang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, dengan upaya yang dilakukan secara terus menerus, serta dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas, niscaya kondisi tersebut akan bisa terwujud.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut, dan mempertimbangkan masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2021. Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan tata kelola pemanfaatan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
3. Meningkatkan keamanan data dan informasi pemerintah daerah.

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana tahunan yang sifatnya menyeluruh. Adapun sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan infrastruktur TIK dan penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatnya akurasi data statistik sektoral.
4. Meningkatnya keamanan data dan informasi pemerintah daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 yang direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banggai, pengembangan daerah yang terisolir jaringan telekomunikasi (*blankspot area*), pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 terdiri dari 13 Program dan 52 Kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu anggaran indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebesar Rp.6.620.252.633 yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 2** (Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Mengacu pada program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan keselarasan pada visi, misi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai serta mempertimbangkan masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen Rencana Induk (Masterplan) Smart City guna mewujudkan pengembangan Smart City di Kabupaten Banggai.
2. Mengintegrasikan data antar perangkat daerah.
3. Mengembangkan teknologi informasi untukantisipasi kerusakan data.
4. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan SDM bidang TIK untuk mendukung pengelolaan data dan informasi serta penyebarluasannya.
6. Meningkatkan SDM bidang persandian untuk mendukung penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan data dan informasi pemda.
7. Menguatkan regulasi komunikasi, tata kelola TIK, dan persandian.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal.
4. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis TIK.
5. Menyusun/menyempurnakan pedoman layanan informasi dan komunikasi publik.
6. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

4.2. Pendanaan

Secara indikatif pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 seluruhnya akan bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Total pagu anggaran indikatif tahun 2020 sebesar Rp.6.620.252.633. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
2. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
3. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut : biaya transportasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom.
5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan SDM diprioritaskan penyelenggaraannya secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran .

6. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah (BMD) yang berada dalam penguasaan pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Penganggaran pengadaan barang milik daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
8. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 2** (Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021).

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020, merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini adalah salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 serta memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan (*output*) dan indikator program (*outcome*) ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Pada tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 13 program dan 52 kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 ini dengan efektif dan efisien.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

3. Hasil kinerja dari pelaksanaan Renja Tahun 2020 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat keberhasilan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja pelayanan dan pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dapat terukur dan berkesinambungan.

Demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini untuk dipedomani pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika akan maksimal bila semua perangkat aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen kita bersama dan mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebab kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Amin

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BANGGAI

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.262.002.633				8.844.212.000	
1.	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi			1.718.990.000				1.968.520.887	
	01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibutuhkan	Luwuk	1.120 Lembar	5.040.000	APBD Kab		1.200 Lembar	5.400.000	
	01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan air, listrik dan internet	Luwuk	6 Jaringan	733.200.000	APBD Kab		7 Jaringan	514.092.000	
	01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang diurus izin STNK-nya	Luwuk	10 Unit	9.600.000	APBD Kab		20 Unit	12.540.000	
	01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan/ bahan pembersih	Luwuk	3 Org	64.000.000	APBD Kab		3 Org	71.260.772	
	01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi	Luwuk	22 Jenis	32.000.000	APBD Kab		22 Jenis	37.767.730	
	01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto copy berkas dokumen administrasi perkantoran	Luwuk	2 Jenis	16.600.000	APBD Kab		2 Jenis	16.823.000	
	01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen/alat listrik yang dibutuhkan	Luwuk	5 Jenis	5.700.000	APBD Kab		5 Jenis	6.798.385	
	01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	Luwuk	3.360 Eksemplar	11.000.000	APBD Kab		3.360 Eksemplar	12.000.000	
	01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/ minuman yang dibutuhkan	Luwuk	1.100 Dos	25.850.000	APBD Kab		1.100 Dos	25.850.000	
	01. 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Luar Daerah	12 kali	156.000.000	APBD Kab		43 Kali	257.604.000	
	01. 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah	Kab.Banggai	150 kali	120.000.000	APBD Kab		277 Kali	273.985.000	
	01. 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga teknis dan administrasi	Luwuk	30 Orang	540.000.000	APBD Kab		34 Orang	734.400.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur bidang komunikasi dan informatika yang memadai			648.407.633				859.150.596	
	02. 05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat dan roda dua yang diadakan	Luwuk	10 Unit	215.000.000	APBD Kab		6 Unit	141.197.700	
	02. 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Luwuk	4 Jenis	105.716.500	APBD Kab		5 Jenis	134.650.000	
	02. 09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Luwuk	4 Jenis	66.721.133	APBD Kab		4 Jenis	215.130.481	
	02. 10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diadakan	Luwuk	3 Jenis	25.000.000	APBD Kab		3 Jenis	108.310.415	
	02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Luwuk	21 Unit	68.400.000	APBD Kab		20 Unit	75.600.000	
	02. 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Luwuk	1 Jenis	7.150.000	APBD Kab		13 Unit	7.800.000	
	02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Luwuk	3 Jenis	91.450.000	APBD Kab		30 Unit	100.595.000	
	02. 42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah ruangan / komponen gedung kantor yang direhabilitasi	Luwuk	1 Unit	68.970.000	APBD Kab		2 Unit	75.867.000	
3	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya penerapan disiplin aparatur			203.189.000				70.000.000	
	03. 02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atributnya yang diadakan	Luwuk	81 Pasang	82.607.000	APBD Kab			-	
	03. 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Luwuk	48 Pasang	31.811.000	APBD Kab			-	
	03. 04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Luwuk	48 Pasang	31.811.000	APBD Kab			-	
	03. 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Luwuk	81 Pasang	56.960.000	APBD Kab		100 Pasang	70.000.000	
3	04.	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya pemulangan pegawai yang purna tugas			5.000.000				5.000.000	
	04. 02.	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang purna tugas / pensiun	Luwuk	1 Orang	5.000.000	APBD Kab		1 Orang	5.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas			31.971.000				46.624.710	
	05. 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Dalam daerah dan Luar Daerah	4 Orang	28.000.000	APBD Kab		4 Orang	41.800.000	
	05. 06	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Jumlah Dokumen kepegawaian yang tersusun	Luwuk	3 Dokumen	3.971.000	APBD Kab		3 Dokumen	4.824.710	
5	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja arapatur dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan			88.545.000				140.254.525	
	06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan laporan TEPRa yang disusun secara akuntabel	Luwuk	2 Dokumen	2.522.000	APBD Kab		2 Dokumen	3.606.460	
	06. 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi keuangan bulanan dan laporan prognosis yang tersusun	Luwuk	13 Laporan	1.560.000	APBD Kab		13 Laporan	2.230.800	
	06. 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang tersusun	Luwuk	1 Dokumen	2.500.000	APBD Kab		1 Dokumen	2.750.000	
	06. 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	Kab.Banggai	5 Dokumen	76.963.000	APBD Kab		6 Dokumen	126.167.265	
	06. 07	Penyusunan Dokumen RKBu Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBu yang tersusun	Luwuk	1 Dokumen	2.500.000	APBD Kab		1 Dokumen	2.750.000	
	06. 09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Dinas Kominfo yang tersusun	Luwuk	1 Dokumen	2.500.000	APBD Kab		1 Dokumen	2.750.000	
6	07.	Program Pengembangan Sistem Informasi / Data	Terpenuhinya peningkatan sistem informasi / data profil dinas			2.500.000				2.750.000	
	07. 04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil Dinas yang tersusun	Luwuk	1 Dokumen	2.500.000	APBD Kab		1 Dokumen	2.750.000	
7	08.	Program Perencanaan Umum	Terpenuhinya peningkatan sistem informasi / data profil dinas			2.500.000				2.750.000	
	08. 02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Luwuk	1 Dokumen	2.500.000	APBD Kab		1 Dokumen	2.750.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Terpenuhinya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa lokal			3.113.900.000				4.195.963.282	
	15. 01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah lembaga penyiaran yang dilakukan pengawasan	Kab.Banggai	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kab		93 buah	71.500.000	
	15. 02.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah infrastruktur dasar dan sarana TIK (Repeater seluler, Repeater VHF dan V-Sat) yang terbangun/ terpasang	Kab.Banggai	3 Jenis	2.500.000.000	APBD Kab		3 Jenis	3.771.463.282	
	15. 06.	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah laporan monitoring pengawasan informasi publik	Kab.Banggai	1 Dokumen	70.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	165.000.000	
	15. 07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen rencana induk (Masterplan) Smart City yang tersusun	Luwuk	1 Dokumen	350.000.000	APBD Kab			-	
	15. 10	Pembangunan media center	Jumlah media center yang dibuat guna mendukung pelayanan informasi publik	Luwuk	1 Ruang	65.000.000	APBD Kab			-	
	15. 11	Operasional pelayanan media center	Jumlah kebutuhan operasional media center	Luwuk	3 Jenis	5.000.000	APBD Kab		3 Jenis	5.500.000	
	15. 12	Pengembangan dan pengelolaan Website daerah	Jumlah situs web daerah yang dikelola	Luwuk	1 situs	23.900.000	APBD Kab		1 situs	60.500.000	
	15. 13	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi informatika publik dan pemerintahan yang dikembangkan dan dikelola	Luwuk	1 Aplikasi	50.000.000	APBD Kab		1 Aplikasi	122.000.000	
9	17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			80.000.000				55.000.000	
	17. 01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang TIK	Dalam/Luar Daerah	5 Orang	80.000.000	APBD Kab		5 Orang	55.000.000	
10	18	Program Kerjasama Informasi dengan media massa	Terpenuhinya pelayanan informasi publik melalui kerja sama dengan media massa			372.000.000				1.503.198.000	
	18. 02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab.Banggai	2 Media	100.000.000	APBD Kab		2 Media	496.500.000	
	18. 03.	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah media penyebarluasan informasi pembangunan daerah bagi masyarakat melalui spanduk, baliho, standing banner	Kab.Banggai	3 Media	80.000.000	APBD Kab		3 Media	473.998.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18. 04.	Dukungan Pemanfaatan Informasi Warung Masyarakat (WIM)	Jumlah Warung Informasi Masyarakat (WIM)	Kab.Banggai	1 WIM	25.000.000	APBD Kab		1 WIM	27.500.000	
	18. 05.	Melaksanakan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi	Kab.Banggai	6 Kelompok	50.000.000	APBD Kab		4 Kelompok	55.000.000	
	18. 7	Mengadakan Sosialisasi Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah sosialisasi pemanfaatan TIK secara terpadu	Luwuk	1 Kegiatan	27.000.000	APBD Kab		1 Kegiatan	29.700.000	
	18. 10	Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media informasi	Jumlah media pelayanan informasi kepada masyarakat	Kab.Banggai	2 Media	90.000.000	APBD Kab		2 Media	420.500.000	
	2.14	STATISTIK				120.000.000				188.000.000	
11	16.	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Terpenuhinya pengembangan data statistik sektoral			120.000.000				188.000.000	
	16. 01	Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil survei data statistik sektoral yang dilaksanakan	Kab.Banggai	1 Dokumen	60.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	100.000.000	
	16. 03.	Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil olahan dan analisa data statistik sektoral	Luwuk	1 Dokumen	30.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	44.000.000	
	16. 04.	Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen diseminasi data statistik sektoral yang dilaksanakan	Kab.Banggai	1 Dokumen	30.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	44.000.000	
	2.15	PERSANDIAN				238.250.000				349.350.000	
12	15.	Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	Terpenuhinya pengelolaan informasi, elektronika, sandi telekomunikasi dan informasi teknologi lainnya			120.750.000				212.850.000	
	15. 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan Informasi Teknologi Lainnya	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan informasi elektronik sesuai Standar SOC	Kab.Banggai	5 OPD	49.000.000	APBD Kab		7 OPD	53.900.000	
	15. 02	Penyelenggaraan dan Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Persandian	Jumlah aplikasi yang sudah menggunakan kunci sistem sandi pada perangkat daerah	Kab.Banggai	2 Aplikasi	19.250.000	APBD Kab		2 Aplikasi	101.200.000	
	15. 04	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sandiman	Luar Daerah	2 Org	52.500.000	APBD Kab		2 Org	57.750.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	16.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah			117.500.000				136.500.000	
	16. 02	Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk penagaman Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah produk hukum penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemma	Kab.Banggai	1 Dokumen	65.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	78.750.000	
	16. 02	Konsultasi & Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemma	Kab.Banggai	6 Kali	40.000.000	APBD Kab		5 Kali	44.000.000	
	16. 03	Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	Jumlah dokumen basis data informasi analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian	Kab.Banggai	1 Dokumen	12.500.000	APBD Kab		1 Dokumen	13.750.000	
TOTAL						6.620.252.633				9.381.562.000	



Luwuk, 15 Juli 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai

[Handwritten Signature]
Drs. DJAYADIN, MM
NIP.19611113 198903 1 005